

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024**

NAMA SKPD	: DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN	: Urusan Perhubungan
TUGAS POKOK	: Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
FUNGSI	: <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, perparkiran, dan kesekretariatan;2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;3. Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;4. Pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perhubungan;6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran; dan9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan :			
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan Infrastruktur Perhubungan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Cakupan infrastruktur perhubungan merupakan tolak ukur kemajuan wilayah yang meliputi peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan, peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalulintas, serta peningkatan angkutan umum layak jalan.</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Angkutan Jalan 2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pendukung Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas 3. Persentase Peningkatan Masyarakat Sadar Bidang Keselamatan Berlalu Lintas 4. Persentase Peningkatan Angkutan Umum Layak Jalan <p>Satuan : Prosentase</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>Sumber Data : Dinas Perhubungan</p>

Sasaran :			
1.1	Cakupan Infrastruktur Perhubungan	Capaian Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Infrastruktur perhubungan yang baik dan memadai merupakan sarana yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan + Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas + Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan)/4</p> <p>Satuan : Prosentase (%)</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perhubungan</p>



Kota Mungkid, 6 Januari 2020
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN MAGELANG

IMAM BASORI, S. Sos., M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19701115 199003 1 003